

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan salah satu unsur yang penting dalam mewujudkan terciptanya *good governance* pada organisasi sektor publik dan swasta (Bastian, 2014). Dalam sektor publik, audit dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi kegiatan operasi, serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (SAIPI, 2021). Sementara itu, dalam sektor swasta, audit berperan dalam menjamin bahwa laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan informasi publik lainnya telah memadai (Randal et al., 2020). Kedua konteks tersebut menekankan bahwa audit merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan terciptanya *good governance*. Hal ini sesuai dengan karakteristik utama dalam pencapaian *good governance*, yaitu partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif, efisien, serta menaati aturan hukum yang berlaku (Unescap, 2018). Implementasi prinsip *good governance* pada sektor publik dapat meningkatkan kinerja organisasi dan dapat mengurangi tingkat korupsi (IFAC, 2013). Untuk itu, audit berfungsi sebagai alat bagi organisasi sektor publik dan swasta dalam mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan prinsip *good governance* (Masood dan Afzal, 2016).

Salah satu isu yang dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan audit pada sektor publik yaitu kualitas audit (Ismail et al, 2019). Hal ini didorong oleh ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap auditor untuk memberantas kasus korupsi atau setidaknya mengurangi terjadinya korupsi (Otalor & Eliya, 2013). Dalam hal ini, pelaksanaan audit yang berkualitas dapat mengurangi dan/atau mendeteksi terjadinya korupsi pada organisasi sektor publik (Gustavson & Sundström, 2016). Sebaliknya, rendahnya kualitas audit yang dilakukan dapat memicu terjadinya penyimpangan dan korupsi (Halim dan Kusufi, 2014). Lebih lanjut, maraknya korupsi dapat menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik dan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik (KPK, 2023).

Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia akibat rendahnya kualitas audit yaitu kasus korupsi walikota Bandung nonaktif, Yana Mulyana. Mengutip berita dari laman detik.com (diakses pada 20 Oktober 2023), KPK menyoroti lemahnya pengawasan intern yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung. Kondisi ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejadian kasus korupsi di Kota Bandung sudah sering terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Kusufi (2014), sebagaimana audit dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat korupsi yang terjadi. Lebih lanjut, tingginya kualitas audit dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan *good governance* yang berdampak pada penurunan tingkat korupsi pada organisasi sektor publik (Gustavson & Sundström, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab untuk melakukan

pengawasan intern sesuai standar audit serta kualitas audit dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat mutu standar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI, 2021), pelaksanaan audit harus dilakukan secara independen dan objektif serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian tugas pengawasan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan audit harus dapat memberikan nilai tambah terhadap peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Hal ini dapat dilakukan jika auditor mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, melakukan analisis atas bukti audit, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi masalah.

Namun demikian, salah satu permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan tingginya kualitas audit yaitu masih rendahnya kapabilitas sebagian besar APIP di Indonesia. Menurut Sumanti (2020), kapabilitas APIP menggambarkan kemampuan APIP dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien untuk memberikan *value added* dalam peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi. Kapabilitas APIP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mendorong organisasi APIP agar dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Triwulan II Tahun 2023, diketahui bahwa persentase kapabilitas APIP di Indonesia yang efektif masih belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data tersebut, capaian tersebut hanya sebesar 67,54% dari target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kapabilitas

APIP di Indonesia masih menghadapi tantangan yang dapat berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan.

Pada dasarnya, terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas audit. Meskipun demikian, belum terdapat indikator yang pasti dalam menentukan kualitas audit (Knechel et al. 2013). Berdasarkan penelitian Widiastuty dan Febrianto (2010, dikutip dalam Ariwibowo 2023), pengukuran kualitas audit dilakukan dengan menilai sejauh mana pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa terdapat dua dasar penilaian praktis terhadap kesesuaian pelaksanaan audit, yaitu independensi dan kompetensi auditor. Selain itu, berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021, kualitas audit diukur berdasarkan penilaian terhadap kapabilitas APIP. Dalam hal ini, salah satu aspek yang dinilai yaitu penerapan prinsip etika. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa aspek etika tersebut dilakukan untuk menilai penerapan etika APIP dalam menegakan nilai integritas, akuntabilitas, objektivitas, dan perilaku profesional dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Salah satu permasalahan yang menjadi isu terkait dengan kualitas audit yaitu adanya permasalahan *Reduced Audit Quality* (RAQ) (Al-Qatamin dan Salleh, 2020). Ketidaksesuaian pelaksanaan audit terhadap standar audit merupakan bagian dari praktik RAQ (Malone & Roberts 1996, dikutip dalam Khoiriyah et al., 2023). Beberapa praktik RAQ antara lain meliputi penyusunan simpulan audit yang tidak didasarkan pada bukti yang cukup, prosedur audit yang tidak dilaksanakan seluruhnya, dan aktivitas lainnya yang tidak sesuai dengan prosedur audit atau lainnya di bawah standar yang berlaku (Smith & Emerson, 2017). Dalam hal ini,

beberapa praktik RAQ tersebut diantaranya dapat dipengaruhi oleh penegakan nilai etika organisasi. Menurut Al-Qatamin dan Salleh (2020), kinerja auditor dapat menurun disebabkan oleh lingkungan pekerjaan yang buruk. Lebih lanjut, buruknya lingkungan pekerjaan tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian organisasi yaitu terkait buruknya penegakan nilai integritas dan etika organisasi (Harahap dan Isgiyarta, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin (2019), diketahui bahwa terdapat pengaruh stres auditor terhadap praktik RAQ. Secara lebih lanjut, stres kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya yaitu tekanan dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan (Umar, 2017). Sejalan dengan penelitian tersebut, Pierce dan Sweeney (2004, dikutip dalam Yan dan Xie, 2016) menjelaskan bahwa stres kerja tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas audit akibat tidak optimalnya proses pelaksanaan audit yang dilakukan.

Berdasarkan definisinya, stres merupakan kondisi psikologis yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki individu (Lazarus dan Folkman 1984, dikutip dalam Biggs et al., 2017). Dalam hal ini, tingginya stres memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai (Masihabadi, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian Whitfield dan Cachia (2018) yang menjelaskan berdasarkan pendekatan psikologi pegawai, tingginya stres dapat berdampak pada penurunan kinerja dan produktivitas pegawai. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi kondisi tersebut yaitu dengan menggunakan pendekatan *coping strategy* yang tepat.

Stress coping strategy merupakan gambaran umum tindakan yang dilakukan oleh individu dalam menghadapi stres atau masalah (Israel et al., 1989 dikutip dalam Bauer et al., 2023). *Stress coping strategy* dapat digunakan untuk mengurangi adanya gangguan terhadap profesionalisme yang dapat berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan (Pankratova, 2018). Penentuan *coping strategy* yang tepat diharapkan dapat mencegah praktik RAQ akibat stres yang dikelola dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saczuk et al. (2019), penentuan *coping strategy* yang tepat dapat menekan tingkat stres yang dialami oleh individu. Oleh karena itu, penentuan *stress coping strategy* yang tepat diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat terhindar dari praktik RAQ.

Selain itu, terdapat tantangan lainnya yang dapat memengaruhi terjadinya praktik RAQ, yakni penegakan nilai etika organisasi sebagai bagian dari unsur pengendalian intern organisasi (Rabaiah et al., 2021). Lebih lanjut, penegakan nilai etika organisasi merupakan bagian dari lingkungan pengendalian dalam pengendalian intern organisasi. Dalam hal ini, jika penegakan nilai etika organisasi semakin baik, maka hal tersebut berdampak positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin buruk penegakan nilai etika organisasi, maka hal tersebut dapat berdampak pada timbulnya praktik RAQ pada organisasi. Penegakan nilai etika organisasi dapat berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan sebagaimana hal tersebut dapat mendorong tercapainya peran APIP yang efektif dalam organisasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada belum banyaknya penelitian yang menguji secara langsung pengaruh *stress coping strategy* dan *ethical climate* terhadap RAQ. Kondisi ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bauer et al. (2023) yang menguji pengaruh *coping strategy* terhadap *audit judgement*. Sementara itu, penentuan variabel *ethical climate* didasarkan pada belum banyaknya penelitian yang menguji pengaruh *ethical climate* terhadap RAQ. *Ethical climate* merupakan persepsi individu anggota organisasi terhadap etis atau tidaknya perilaku dalam suatu organisasi berdasarkan kebijakan serta prosedur lainnya yang bersifat formal maupun informal (Victor dan Cullen, 1988, dikutip dalam Ismail dan Yuhani, 2019). *Ethical climate* yang kondusif dapat memengaruhi kinerja serta motivasi auditor dalam melaksanakan tugasnya (Svanberg dan Öhman, 2013). Berbeda dengan *professional ethics* yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar audit, lingkup *ethical climate* meliputi aspek pengendalian formal dan informal organisasi (Nasrabadi dan Arbabian, 2015).

Subjek penelitian ini yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku APIP di lingkungan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran belanja terbesar di antara kementerian lainnya pada TA 2024, yakni sebesar Rp146,98 Triliun (databoks.katadata.co.id, diakses pada 24 Oktober 2023). Dalam hal ini, semakin besar anggaran yang dikelola, risiko penyalahgunaan anggaran juga semakin besar (Windarti, 2015). Hal tersebut sejalan dengan modus kasus korupsi di Indonesia yang sebagian besar merupakan penyalahgunaan anggaran dan Pengadaan

Barang/Jasa yang melekat dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR (ICW, 2023).

Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR selaku auditor internal dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran serta memaksimalkan perannya untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dengan lingkup pengawasan yang besar dan tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, serta terbatasnya jumlah auditor yang tersedia, setiap individu auditor harus dapat mengelola tingkat stresnya dengan baik. Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA 2022, diketahui bahwa terdapat *gap* kebutuhan auditor sebanyak 185 orang. Selain itu, jika dianalisis lebih lanjut, tingkat pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 memiliki realisasi yang lebih dari target yang telah direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap individu auditor memiliki beban kerja yang relatif tinggi. Adanya *gap* jumlah auditor dan jumlah pengawasan yang tinggi tersebut dapat mendorong peningkatan tingkat stres auditor sehingga menyebabkan terjadinya praktik RAQ akibat tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi.

Jika dilakukan analisis lebih lanjut, adanya praktik RAQ dapat terbukti dari adanya penurunan hasil penilaian telaah sejawat intern yang dilakukan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Telaah sejawat bertujuan untuk penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi APIP dan kesesuaian aktivitas APIP dibandingkan dengan standar audit (AAIPI, 2014). Dalam hal ini, hasil nilai telaah sejawat intern di lingkungan Inspektorat Jenderal diuraikan sebagai berikut.

Tabel I.1 Perbandingan Hasil Telaah Sejawat Intern

Unit Eselon II	Nilai Telaah Sejawat Tahun 2022	Nilai Telaah Sejawat Tahun 2023	Keterangan
Inspektorat I	95,45	93,34	Menurun
Inspektorat II	94,75	94,17	Menurun
Inspektorat III	97,20	92,17	Menurun
Inspektorat IV	94,91	90,55	Menurun
Inspektorat V	94,67	93,21	Menurun
Inspektorat VI	95,01	94,68	Menurun

Sumber: Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa seluruh unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mengalami penurunan nilai telaah sejawat sebagaimana hal ini disebabkan oleh adanya penurunan dalam hal ketidaksesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit. Selain itu, berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa penegakan nilai etika dalam organisasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum seluruh pegawai mengikuti kegiatan sosialisasi penegakan nilai etika dan perilaku antikorupsi yang dapat mendorong terciptanya *ethical climate* yang kondusif. Dalam hal ini, mengacu pada SAIPI, pelaksanaan audit harus dilakukan sesuai dengan standar audit dan APIP harus senantiasa mendorong penerapan etika dan nilai organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Perbedaan fenomena yang terjadi dan kondisi ideal yang seharusnya terjadi disebabkan oleh adanya perilaku disfungsional oleh auditor. Dalam hal ini, lebih lanjut dijelaskan bahwa teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Hestanto. 2017). Tingginya beban kerja yang dapat menimbulkan stres dan iklim etika yang dapat memengaruhi

pengambilan keputusan etis dalam pelaksanaan audit dapat memengaruhi perilaku individu auditor. Lebih lanjut, kedua fenomena tersebut dipengaruhi oleh perilaku auditor dan dapat berdampak terhadap terjadinya praktik RAQ.

Selain itu, meskipun nilai kapabilitas APIP Kementerian PUPR telah mencapai target yang diharapkan, yaitu level 4 (*managed*), tetapi tingginya beban kerja dan tekanan waktu dapat meningkatkan potensi terjadinya penurunan kualitas audit sebagaimana dibuktikan dengan terjadinya fenomena tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan level kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR hingga level 5 (*optimizing*), auditor diantaranya harus selalu meningkatkan praktik profesional secara berkelanjutan agar dapat mengoptimalkan kualitas audit yang dihasilkan.

Atas kondisi tersebut, pejabat terkait dan *stakeholder* lainnya perlu memberikan perhatian khusus terhadap adanya potensi permasalahan penurunan kualitas audit yang dihasilkan. Dalam konteks ini, tingginya beban kerja dan iklim etika yang tidak kondusif dapat menimbulkan tekanan bagi individu auditor yang dapat mendorong perilaku RAQ. Oleh karena itu, pemahaman individu auditor terhadap nilai etika yang berlaku menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh *stakeholder*.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam upaya mengatasi terjadinya praktik RAQ. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan manajemen risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan APIP di

organisasi sektor publik lainnya serta memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Dengan belum banyaknya penelitian sejenis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk perbaikan tata kelola APIP di organisasi sektor publik dan sebagai dasar penelitian akademis lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana dijelaskan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara *stress coping strategy* dan *ethical climate* terhadap *reduced audit quality* baik secara parsial maupun secara simultan. Dalam hal ini, penelitian ini perlu dilakukan agar pimpinan APIP dan *stakeholder* lainnya dapat mengidentifikasi solusi untuk mengatasi terjadinya praktik *reduced audit quality* yang terjadi di Kementerian PUPR untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis yang dilakukan. Atas kondisi tersebut, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi terjadinya praktik RAQ di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan judul “PENGARUH *STRESS COPING STRATEGY* DAN *ETHICAL CLIMATE* TERHADAP *REDUCED AUDIT QUALITY* (RAQ) STUDI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah *stress coping strategy* berpengaruh negatif terhadap praktik *Reduced Audit Quality* (RAQ)?

1.2.2 Apakah *ethical climate* berpengaruh negatif terhadap praktik *Reduced Audit Quality* (RAQ)?

1.2.3 Apakah *stress coping strategy* dan *ethical climate* berpengaruh negatif secara simultan terhadap praktik *Reduced Audit Quality* (RAQ)?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui adanya pengaruh secara negatif antara *stress coping strategy* terhadap praktik *Reduced Audit Quality* (RAQ) di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

1.3.2 Untuk mengetahui adanya pengaruh secara negatif antara *ethical climate* terhadap praktik *Reduced Audit Quality* (RAQ) di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

1.3.3 Untuk mengetahui adanya pengaruh secara negatif secara simultan antara *stress coping strategy* dan *ethical climate* terhadap praktik *Reduced Audit Quality* (RAQ) di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti pengaruh *stress coping strategy* dan *ethical climate* terhadap *Reduced Audit Quality* (RAQ) di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Dalam hal ini, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner pada auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Hasil kuesioner tersebut menjadi data dasar yang selanjutnya akan diolah oleh peneliti.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami praktik *reduced audit quality* dan faktor yang mungkin memengaruhinya seperti *stress coping strategy* dan *ethical climate*.

1.5.2 Bagi Pihak Lain

1.5.2.1 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas lebih lanjut dan/atau mengembangkan pembahasan terkait *reduced audit quality* dan faktor yang memengaruhinya.

1.5.2.2 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat membantu auditor dan *stakeholder* lainnya untuk mengatasi praktik *reduced audit quality*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dilakukan dalam lima bab dengan sistematika penulisan meliputi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan simpulan dan saran. Dalam hal ini, uraian singkat dalam setiap bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan pendahuluan penelitian yang meliputi penjelasan latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan teori yang digunakan untuk membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu terkait definisi audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), standar audit, *reduced audit quality*, teori atribusi, *ethical climate*, dan *stress coping strategy* serta kaitannya dengan praktik penurunan kualitas audit. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan terkait penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan rancangan penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan pengukuran, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan uji hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan hasil analisis penelitian yang didasarkan dari data yang telah diolah. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan pembahasan yang menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V menjelaskan simpulan penelitian, keterbatasan, dan saran penelitian yang dapat diuraikan sesuai dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bab ini juga membahas terkait dengan rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil penelitian, serta keterbatasan hasil penelitian.